

**PENGARUH PEMEKARAN TERHADAP PEMBANGUNAN
(KAJIAN PEMEKARAN DI KALIMANTAN TIMUR)**

Oleh : Florentinus Sudiran

Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

=====

ABSTRACT

This research is held in East Kalimantan during the year of 2012 to 2014 .The method of the research is kualitatif one.The collection of the data is taken from the library ,and news paper.The theory of the dependent and independent variables taken from literature such as books in the library of the University of 17 Agustus 1945 Samarinda and others.The news was taken from newspapers Tribun Kaltim and Kaltimpost.The result of the research is that most of the DOB in East Kalimantan is succesful in managing the government.Especially for the South-East Kalimantan as the pormising DOB (new area autonomy) is still in the discusssion because there are many arguments whether people agreee or disagree .Some who agree they say that its better to make DOB (new area autonomy) South-East Kalimantan to encourage the area to develop.On the other hand who do not agree to have DOB South-East Kalimantan it is imposible to do because the resource of the area is very limited.

Key-words : area, develop, new, resource

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur. Daerah yang juga dikenal sebagai gudang kayu dan hasil pertambangan ini mempunyai ratusan sungai yang tersebar pada hampir semua kabupaten/kota dan merupakan sarana angkutan utama di samping angkutan darat, dengan sungai yang terpanjang adalah Sungai Mahakam.

Sebelum pemekaran Provinsi Kalimantan Utara , Provinsi Kalimantan Timur terletak di sebelah paling timur Pulau Kalimantan dan sekaligus merupakan wilayah perbatasan dengan Negara Malaysia , khususnya Negara Sabah dan Sarawak. Tepatnya provinsi ini berbatasan langsung dengan Negara Malaysia di sebelah utara, Laut Sulawesi dan Selat Makasar di sebelah timur, Kalimantan Selatan di sebelah selatan, dan dengan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah serta Malaysia di sebelah barat.

Daratan Kalimantan Timur tidak terlepas dari gugusan gunung dan pegunungan yang terdapat hampir di seluruh kabupaten, yaitu ada sekitar 13 gunung. Gunung yang paling tinggi di Kalimantan Timur

yaitu Gunung Makita dengan ketinggian 2.987 meter yang terletak di Kabupaten Bulungan. Sedang untuk danau yang berjumlah sekitar 17 buah, keseluruhannya berada di Kabupaten Kutai dengan danau yang paling luas yaitu Danau Jempang, Danau Semayang, dan Danau Melintang dengan luas masing-masing 15.000 hektar, 13.000 hektar, dan 11.000 hektar.

Pemekaran di provinsi ini telah terjadi 8 (delapan) kali dan masih akan terjadi terus dimekarkan seiring seberapa jauh kemampuan pemerintah daerah yang bersangkutan memenuhi aspirasi rakyat dengan kegiatan yang pro rakyat. Bila kurang pro rakyat maka pemekaran akan terus berlanjut baik Pemerintah Kota / Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi. Namun setelah pemekaran laju pertumbuhannya sangat signifikan walaupun dengan taruhannya lingkungan menjadi rusak akibat pembabatan hutan, kegiatan penambangan batubara, minyak, gas, emas dan mineral lainnya yang akibatnya wilayah ilirnya seperti Samarinda dan Muara Kutai Kartanegara menderita bencana banjir. Dari latar belakang inilah peneliti ingin meneliti dampak pemekaran provinsi baru terpisah dari wilayah Kalimantan Timur yaitu Provinsi Kalimantan Tenggara.

B. Rumusan masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa dampak dari pemekaran wilayah di Provinsi Kalimantan Tenggara ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui apa dampak dari pemekaran wilayah di Provinsi Kalimantan Tenggara

KERANGKA DASAR TEORI

A. Pemekaran

Dilihat dari segi kebahasaan pemekaran berasal dari kata mekar yang bisa menjadi kata kerja dan kata sifat. Sebagai kata kerja bahwa mekar berarti bertambah atau menyeruak keluar yaitu lebih dari aslinya. Mekar dia kata sifat adalah keadaan berkembang dinamis. Bila dihubungkan dengan pemekaran wilayah atau daerah baik Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi maka yang semula sebuah wilayah semula hanya satu Pemerintah Kota / Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi menjadi dua atau tiga atau empat dan atau lebih dan atau berdiri yang baru dalam Negara

kesatuan Negara Republik Indonesia atau NKRI. Salah satu syarat pemekaran menurut dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah :

1. Pemekaran Kecamatan menjadi Pemerintah Kota / Kabupaten harus memiliki minimum 5 (lima) kecamatan.
2. Pemekaran Pemerintah Kota / Pemerintah Kabupaten menjadi Pemerintah Provinsi harus memiliki minimum 5 (lima) Pemerintah Kota / Pemerintah Kabupaten.

B. Wilayah

Wilayah atau area adalah suatu daerah tertentu yang mempunyai batas-batas tertentu yaitu sebelah utara, selatan, barat dan timur. Secara geografis wilayah itu berupa rukun tetangga, rukun warga pemerintah kelurahan, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Wilayah merupakan salah satu syarat penting untuk membentuk sebuah negara. Salah satu syarat pemekaran adalah wilayah dalam suatu negara dibagi menjadi beberapa provinsi dan sebuah provinsi dibagi menjadi beberapa pemerintah kota / pemerintah kabupaten minimum 5 (lima) buah, sebuah pemerintah kota / pemerintah kabupaten menjadi beberapa kecamatan minimum 5 (lima) buah. Bila wilayah dihubungkan dengan pemekaran maka ia adalah obyek mutlak dalam pemekaran.

C. Pembangunan

Hampir empat dasa warsa Indonesia melaksanakan pembangunan di segala bidang. Ada beberapa pembangunan yang berhasil tetapi ada yang gagal. Pembangunan dalam Bahasa Inggris adalah development yang artinya membuat sesuatu yang baru. Pembangunan di daerah perkotaan dan kabupaten sangat jauh. Berbagai pengaruh dalam pembangunan perkotaan tidak terlepas dari berbagai tantangan baik secara internal maupun eksternal. Menurut Indrawati dalam Soegijoko (2005 : iv) mengatakan bahwa

“Secara umum tantangan pembangunan kawasan perkotaan dapat dikelompokkan menjadi tantangan yang menyangkut lingkungan eksternal kota dan tantangan yang mencakup internal kota itu sendiri. Lingkungan eksternal kota dapat diartikan keterkaitan kota dengan kota lainnya atau dengan kawasan-wilayah yang lebih luas termasuk keterkaitan dengan pedesaan atau seringkali disebut dengan pendekatan kewilayahan. Sedangkan tantangan internal kota adalah permasalahan yang terjadi di dalam kota itu sendiri.”

1. Tantangan pembangunan perkotaan

a. Tantangan pembangunan perkotaan dari eksternal

Tantangan eksternal yang dihadapi terkait dengan dampak globalisasi, aliran investasi, informasi, komoditas, teknologi, dan transportasi yang ada keterkaitan antara kota yang satu dengan yang lain. Keterkaitan ini didukung dan didorong oleh kemajuan teknologi di bidang telekomunikasi dan transportasi yang akan memfasilitasi berlangsungnya integrasi sistem perekonomian global. Kota-kota metropolitan semakin terintegrasi ke dalam sistem keterkaitan kota global (*global cities*) sebagai pusat kontrol kegiatan ekonomi global, khususnya bidang jasa, finansial dan manajemen kota-kota metropolitan di Indonesia seperti Jakarta dan Surabaya saat ini telah terjadi keterkaitan antar kota dunia. Namun demikian, di samping peluang-peluang yang ditawarkan dalam proses integrasi tersebut, pesatnya kegiatan perekonomian pada kota-kota utama tersebut umumnya diikuti dengan fenomena eksklusivisme permukiman kota yang mengakibatkan terjadi peningkatan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat kota. Pada konteks kewilayahan kota-kota tersebut melaju meninggalkan kota-kota lain dan menjadi magnet yang semakin kuat untuk menarik pedagang dari kota-kota yang lebih kecil dan juga pedesaan. sehingga keterkaitan antara kota di tingkat nasional akan melemah.

b. Tantangan pembangunan perkotaan dari internal

Sementara itu, di tingkat internal kota tantangan juga muncul dalam upaya memenuhi peningkatan permintaan terhadap pelayanan publik seperti transportasi massal, air bersih, sanitasi, energi, perumahan, pekerjaan yang layak, lingkungan yang aman bersih dan sehat. Kondisi lapangan menunjukkan bahwa perkembangan kota yang terjadi selalu ditandai dengan peningkatan kemacetan, polusi, kriminalitas, dan rendahnya mutu pelayanan publik. Di bidang manajemen perkotaan, kota-kota juga menghadapi problem kemiskinan perkotaan, kesemrawutan, penataan sektor informal, lemahnya antisipasi terhadap akan munculnya pedagang kaki lima (PKL) dari pendatang, penegakan hukum tata ruang dan pasar daerah perkotaan dan meningkatnya agregasi sosial. Tantangan yang lain dikemukakan oleh Budihardjo (1997:41) bahwa :

“Pembangunan tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan yang mencakup : pengadaan perumahan massal, tata guna lahan yang jelek, penggunaan

dan penyalahgunaan teknologi, pertumbuhan penduduk yang tinggi, pasokan air bersih, pencemaran udara dan keterbatasan energi .”

2. Tantangan pembangunan di Kabupaten

a. Tantangan pembangunan di kabupaten dari eksternal

Umumnya kabupaten berada di wilayah pedesaan yang diganggu oleh faktor luar antara lain :

- 1) Banyak tanah yang dibeli oleh investor sehingga pemiliknya menjadi miskin karena belum bisa mengelola uang sehingga untuk konsumtif saja.
- 2) Tanah dibeli dengan harga sangat murah karena ulah para calo ,spekulan tanah dan sifat pemilik tanah yang konsumtif.
- 3) Pemilik diajak kerjasama dengan system plasma atau sejenisnya yang menguntungkan pengusaha
- 4) Banyak tenaga kerja dari luar yang lebih terampil dan berpendidikan lebih tinggi sedangkan yang di tingkat local lebih rendah pendidikannya yang acapkali kalah bersaing dengan mereka hanya sebagai buruh kasar
- 5) Banyak orang luar mengeruk kekayaan alam melalui bisnis yang bermodal besar

b. Tantangan pembangunan dari internal

- 1) Sumber daya manusia masih lemah
- 2) Infrastruktur sangat terbatas
- 3) Pemodal jumlahnya kecil dan modalnya terbatas
- 4) Wilayah terlalu luas
- 5) Penduduk tidak merata dan jumlahnya kecil
- 6) Infrastruktur rusak karena dilewati truk yang melebihi kapasitas
- 7) Kekurangan personel yang mau ditempatkan di pedalaman
- 8) Personel menumpuk di ibukota kabupaten
- 9) Terbatasnya akses kesehatan , pendidikan ,jalan ,perdagangan dan komunikasi
- 10) Orangny rendah diri (minder) dan kurang percaya diri
- 11) Pemerintah daerah selalu kerjasama dengan pihak luar sehingga orangnya sendiri tidak dipakai di daerah sendiri karena kurang tersohor atau kalah bersaing.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum ada pemekaran Provinsi Kalimantan Utara dari Provinsi Kalimantan Timur peneliti mendapatkan data Buku Kerja Kaltim 2012 bahwa luas Provinsi Kalimantan Timur adalah 208.657,74 km² yang terbagi atas luas daratan 198.441,17 km² dan luas pengelolaan laut (0 -12 mil) 10.216,57 km². Provinsi ini terletak antara 113044' Bujur Timur dan 119000' Bujur Barat serta diantara 4024' Lintang Utara dan 2025' Lintang Selatan. Provinsi Kalimantan Timur terluas di Indonesia.

A. Pemekaran Tahap Pertama

Pada tahun 1975 Kalimantan Timur hanya memiliki 4 (empat) Kabupaten Daerah Tingkat II (sekarang Pemerintah Kabupaten (sekarang disebut Pemkab) dan 2 (dua) Kota Madya daerah Tingkat II (sekarang Pemerintah Kota disingkat Pemkot). Keempat Kabupaten itu adalah Kabupaten Bulungan, Berau, Paser, Kutai Kartanegara yang masing-masing ibukotanya masih sama. Ke dua Kotamadya di Kalimantan Timur adalah Samarinda dan Balikpapan.

B. Pemekaran Tahap Ke Dua

Pemekaran ke dua adalah wilayah Bontang mekar dari Kabupaten Kutai Kartanegara yang waktu itu didirikan 2 (dua) perusahaan raksasa yaitu PT.Badak LNG yang memproduksi gas alam dan PT.Pupuk Kalimantan Timur (PKT). Dua perusahaan tersebut sebagai pendorong berdirinya Kotadya Bontang menambah provinsi ini menjadi 7 (tujuh) daerah Tingkat II yaitu 4 (empat) Kabupaten Daerah Tingkat II (sekarang Pemerintah Kabupaten (sekarang disebut Pemkab) dan 2 (dua) Kota Madya daerah Tingkat II (sekarang Pemerintah Kota disingkat Pemkot). Keempat Kabupaten itu adalah Kabupaten Bulungan, Berau, Paser, Kutai Kartanegara yang masing-masing ibukotanya masih sama. Tiga Kotamadya di Kalimantan Timur adalah Samarinda, Balikpapan dan Bontang.

C. Pemekaran Tahap Ke Tiga

Pemekaran tahap ke tiga adalah berdirinya Kotamadya Tarakan mekar dari Kabupaten Bulungan sehingga menambah provinsi ini memiliki 8 (delapan) daerah Tingkat II yaitu 4 (empat) Kabupaten Daerah Tingkat II (sekarang Pemerintah Kabupaten (sekarang disebut Pemkab) dan 2 (dua) Kota Madya daerah Tingkat II (sekarang Pemerintah Kota disingkat Pemkot). Keempat Kabupaten itu adalah Kabupaten Bulungan, Berau, Paser, Kutai Kartanegara yang masing-masing ibukotanya masih sama. Tiga Kotamadya di Kalimantan Timur adalah Samarinda, Balikpapan, Bontang dan Tarakan.

D. Pemekaran ke empat

Pemekaran ini terjadi pada era reformasi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang merubah numenkatur yaitu:

1. Dari Povinsi Daerah Tingkat I menjadi Pemerintah Provinsi
2. Dari Kabupaten daerah Tingkat II menjadi Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
3. Dari Kotamadya daerah Tingkat II menjadi Pemerintah Kota (Pemkot)

Pada pemekaran wilayah Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten Kalimantan Timur ini memiliki menjadi 9 (Sembilan) Pemerintah Kabupaten, 4(empat) Pemerintah Kota . Kesembilan Kabupaten tersebut adalah

1. Kabupaten Bulungan dengan ibukota Tanjung Selor
2. Kabupaten Berau dengan ibukota Tanjungredeb
3. Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ibukota Tenggarong
4. Kabupaten Paser dengan ibukota Tanah Grogot
5. Kutai Barat dengan ibukota Sendawar
6. Kabupaten Kutai Timur dengan ibukota Sangatta
7. Kabupaten Malinau dengan ibukota Malinau
8. Kabupaten Penajam Paser Utara dengan ibukota Penajam
9. Kabupaten Nunukan dengan ibukota Nunukan

Sedangkan keempat Pemerintah Kota adalah :

1. Kota Balikpapan ibukotanya Balikpapan
2. Kota Samarinda ibukotanya Samarinda
3. Kota Tarakan ibukotanya Tarakan dan
4. Kota Bontang ibukotanya Bontang.

E. Pemekaran ke lima

Pada pemekaran ini dipicu oleh ide pemekaran Provinsi Kalimantan Utara dimana setiap pemekaran provinsi harus memiliki minimum (lima) pemerintah Kota dan atau 5 (lima) Pemerintah Kabupaten dan atau kombinasi dari ke duanya yang penting jumlahnya 5 (lima) dari jumlah ke duanya. Oleh karena itu berdirilah Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung dengan ibukotanya Tidung Pale. Kelahirannya di luar dugaan karena Kabupaten Berau tidak mau bergabung dengan Kalimantan Utara alasannya adalah kalau ikut bergabung dengan Kalimantan Utara ia akan kehilangan 800 milyar rupiah per tahun sebagai uang

primbangan dari Provinsi Kalimantan Timur. Keputusan ini tepat dan cerdas karena Berau sedang gigit membangun dengan tehnik senyap namun hasilnya jelas seperti lapangan udara, pasar, Pulau Derawan dan lain-lain. Dengan penambahan Kabupaten Tanah Tidung maka Pemerintah Kabupaten ada 10 (sepuluh) yaitu :

1. Kabupaten Bulungan dengan ibukota Tanjung Selor
2. Kabupaten Berau dengan ibukota Tanjung Redeb
3. Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ibukota Tenggarong
4. Kabupaten Paser dengan ibukota Tanah Grogot,
5. Kutai Barat dengan ibukota Sendawar
6. Kabupaten Kutai Timur dengan ibukota Sangatta,
7. Kabupaten Malinau dengan ibukota Malinau,
8. Kabupaten Penajam Paser Utara dengan ibukota Penajam
9. Kabupaten Nunukan dengan ibukota Nunukan
10. Kabupaten Tanah Tidung dengan ibukota Tidung Pale

F. Pemekaran ke Enam

Pemekaran ke enam ini adalah berdirinya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang terdiri dari 1 (satu) Pemerintah Kota dan 4 (empat) Pemerintah Kabupaten yang meliputi :

1. Kabupaten Bulungan dengan ibukota Tanjung Selor
2. Kabupaten Malinau dengan ibukota Malinau
3. Kabupaten Nunukan dengan ibukota Nunukan
4. Kabupaten Tanah Tidung dengan ibukota Tidung Pale

Sedangkan 1 (satu) Pemerintah Kota adalah Tarakan. Dengan pengurangan tersebut maka Kalimantan Timur memiliki 3 (tiga) Pemerintah Kota dan 6 (enam) Pemerintah Kabupaten. Ke tiga pemerintah kota itu adalah Balikpapan, Bontang dan Samarinda. Sedangkan 6 (enam) Pemerintah Kabupaten adalah

1. Kabupaten Berau dengan ibukota Tanjungredeb
2. Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ibukota Tenggarong
3. Kabupaten Paser dengan ibukota Tanah Grogot,
4. Kutai Barat dengan ibukota Sendawar,
5. Kabupaten Kutai Timur dengan ibukota Sangatta,
6. Kabupaten Penajam Paser Utara dengan ibukota Penajam

G. Pemekaran ke tujuh

Pemekaran ke tujuh adalah lahirnya Pemerintah Kabupaten Mahakam Hulu dengan Ibukota Long Pangai. Wilayah ini pemekaran dari Pemerintah Kabupaten Mahakam Hulu Sehingga Provinsi Kalimantan Timur memiliki 3 (tiga). Ke tiga pemerintah kota itu adalah Balikpapan, Bontang dan Samarinda. Sedangkan Pemerintah Kabupaten provinsi ini memiliki 7 (tujuh) yaitu :

1. Kabupaten Berau dengan ibukota Tanjung Redeb
2. Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ibukota Tenggarong
3. Kabupaten Paser dengan ibukota Tanah Grogot
4. Kutai Barat dengan ibukota Sendawar
5. Kabupaten Kutai Timur dengan ibukota Sangatta
6. Kabupaten Penajam Paser Utara dengan ibukota Penajam
7. Pemerintah Kabupaten Mahakam Hulu dengan Ibukota Long Pangai

H. Pemekaran ke delapan

Pemekaran ke delapan adalah lahirnya Provinsi Kalimantan Utara dengan ibukota Tanjung Selor. Provinsi ini terdiri dari (empat) daerah kabupaten dan 1 (satu) kota. Empat pemerintah kabupaten tersebut adalah Malinau dengan ibukota Malinau, Bulungan dengan ibukota Tanjung Selor, Nunukan dengan ibukota Nunukan, Tana Tidung dengan ibukota Tidung Pale. Satu Pemerintah Kota adalah Tarakan. Dengan pemekaran ini maka rakyat di sana sangat terbantu baik kesejahteraan, karier, sumberdaya manusia, sosial, ekonomi dan pembangunan. Saat ini daerah baru tersebut sedang bekerja keras mengejar ketinggalan dari daerah lain. Daerah terisolasi mulai dibuka, anak daerah dapat berkembang, infrastruktur mulai dibangun dan lain-lain.

Kondisi ekonomi Kaltim tahun 1997 sangat memprihatinkan, hal ini juga tidak terlepas dari dampak turunnya nilai tukar rupiah secara nasional. Dampak dari nilai tukar itu juga mempengaruhi perekonomian daerah seperti di Kaltim. Akan tetapi pada tahun 2004 perekonomian Kaltim sudah mulai nampak adanya tahap pemulihan dari pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur.

Sebagaimana Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2004, laju pertumbuhan sebesar 1,79 persen dengan migas, dan tanpa migas sebesar 6,98 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 1,86 persen dengan migas dan

tanpa migas 5,24 persen sedang pada tahun 2004 terjadi penurunan laju pertumbuhan pada PDRB dengan migas.

Beberapa sektor ekonomi Kalimantan Timur telah mengalami laju pertumbuhan yang lebih tinggi dari sebelumnya dan sebagian lagi juga mengalami penurunan. Diantaranya yang paling tinggi adalah sektor Listrik, Gas dan Air yang pada tahun sebelumnya naik sebesar 1,31 persen menjadi 10,09 persen, Sektor Bangunan juga mengalami peningkatan yang signifikan dari 3,98 persen menjadi 6,78 persen. Industri pengolahan tahun 2003 minus 0,66 persen dan pada tahun 2004 juga minus 0,20 persen.

Demikian juga struktur ekonomi Kalimantan Timur di tahun 2004 baik dengan migas maupun tanpa migas tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, hanya mengalami fluktuasi yang sangat kecil. PDRB dengan migas sangat berperan dalam pembentukan PDRB Kalimantan Timur, seperti sektor pertambangan (38,89 persen), industri pengolahan (37,53 persen), sektor pertanian (6,41 persen), serta sektor perdagangan, hotel & restoran (6,16 persen). Untuk PDRB tanpa migas didominasi oleh lima sektor yang masing-masing mempunyai peranan berkisar antara 9 – 26 persen, lima sektor tersebut adalah sektor pertambangan (26,11 persen), sektor pertanian (16,09 persen), sektor perdagangan, hotel dan restoran (15,46 persen), sektor industri pengolahan (14,73 persen), serta sektor pengangkutan dan komunikasi (9,14 persen).

Pendapatan perkapita, pendapatan perkapita netto atau pendapatan yang diterima penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2004 berdasarkan jumlah penduduk pertengahan tahun 2004 sekitar 2.765.660 jiwa, sebesar Rp 41.272.021,- (dengan migas) yang berarti mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 33.991.833,-, sedangkan pendapatan perkapita tanpa migas justru turun dari Rp 28.531.591,- menjadi Rp 28.508.658,- di tahun 2004. Dengan melihat besarnya pendapatan perkapita penduduk Kalimantan Timur di tahun 2003 dan 2004, maka pertumbuhan pendapatan perkapita penduduk Kalimantan Timur di tahun 2004 adalah 21,42 persen dengan migas dan minus 0,08 persen tanpa migas.

Penduduk Kalimantan Timur dari tahun ke tahun mencatat kenaikan yang cukup berarti. Jumlah penduduk pada tahun 2000 sebesar 2.436.545 jiwa, meningkat menjadi 2.750.369 jiwa pada tahun 2004. Berarti dalam periode tersebut penduduk Kalimantan Timur telah bertambah lebih dari 70 ribu orang setiap tahunnya.

Pertumbuhan penduduk Kalimantan Timur tidak merata sepanjang tahun. Sebagai contoh, pertumbuhan penduduk pada tahun 2000-2001; sebesar 2,88 persen, pada periode 2001-2002; sebesar 2,56 persen, pada periode 2002-2003; sebesar 5,72 persen dan pada periode 2003-2004; turun menjadi 1,68 persen.

Pertumbuhan penduduk di masing-masing Kabupaten/Kota meningkat selama tahun 2003-2004 kecuali Kabupaten Pasir yang mengalami penurunan 0,62 persen. Secara persentase, peningkatan tertinggi terjadi di Kabupaten Berau sebesar 5,51 persen. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 4,01 persen dan kabupaten/kota lainnya pertumbuhannya berkisar 0,5 – 3 persen.

Sebagaimana pertumbuhan dan persebaran penduduk di Kalimantan Timur juga tidak merata. Tetapi penduduk yang semula lebih banyak tinggal di pedesaan sejak tahun 1995 sudah lebih dari 50 persen menetap di daerah perkotaan. Pada tahun 2004 sebagian besar penduduk Kalimantan Timur berada di Kota Samarinda (20,65%), yang merupakan ibukota propinsi di Kalimantan Timur. Selebihnya berada di Kabupaten Kutai (17,65%), Kota Balikpapan (15,67%) dan tersebar di kabupaten lain berkisar 1-6 persen. Pola persebaran penduduk seperti ini sejak tahun 1990 tidak banyak berubah, kecuali bahwa pada tahun 1999 persebaran terbanyak berada di Kabupaten Kutai (32,99 persen), tetapi saat ini Kabupaten Kutai wilayahnya sudah terbagi menjadi 4 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai dan Kota Bontang.

Demikian juga dengan pola persebaran penduduk menurut luas wilayah sangat timpang, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kepadatan penduduk antar daerah yang mencolok, terutama antar daerah kabupaten dengan daerah Kota. Wilayah kabupaten dengan luas 98,85 persen dari wilayah Kalimantan Timur dihuni oleh sekitar 54 persen dari total penduduk Kalimantan Timur. Sedangkan selebihnya, yaitu serta 46 persen menetap di daerah Kota dengan luas 1,15 persen dari wilayah Kalimantan Timur seluruhnya. Akibat kepadatan penduduk di masing-masing daerah kabupaten hanya berkisar 1-35 jiwa/Km² dibanding kepadatan penduduk di Kota Balikpapan sebanyak 497 jiwa/Km², Kota Samarinda 725 jiwa/Km², Kota Tarakan 231 jiwa/Km² dan Kota Bontang 233 jiwa/Km². Sedangkan kepadatan penduduk Kalimantan Timur adalah 12 jiwa/Km². Selain itu daerah ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik berupa pertambangan seperti emas, batubara, minyak dan gas bumi, juga hasil-hasil hutan yang pada umumnya belum dimanfaatkan secara optimal.

Berbagai permasalahan umum yang masih dihadapi oleh daerah ini yang memerlukan percepatan penanggulangan, antara lain:

- Kualitas Angkatan Kerja yang masih rendah yaitu yang berpendidikan SD ke bawah masih 40%;
- Masih banyaknya usia kerja yang belum mendapatkan pekerjaan;
- Belum terhubungnya beberapa ruas jalan antar Kabupaten/Kota;
- Terbatasnya data/informasi SDA dan lingkungan hidup;
- Lemahnya manajemen dan rendahnya mutu SDM, petani, nelayan dan peternak;

- Terbatasnya infrastruktur, sarana, dan prasarana transportasi dari dan ke lokasi obyek wisata;
- Belum optimalnya pemanfaatan lahan-lahan yang potensial.

Guna mengatasi masalah tersebut di atas Pemerintah Provinsi Kaltim, berdasarkan Propeda dan Renstra Pembangunan Kaltim telah menetapkan 3 (tiga) skala Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu:

- 1) Pembangunan dan Pengembangan SDM;
- 2) Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur;
- 3) Pembangunan dan Pengembangan Pertanian dalam arti Luas.

Ketiga program prioritas tersebut mempunyai kedudukan yang setara dan perlu dilaksanakan secara bersamaan karena keberhasilan serta prioritas akan ditentukan oleh kemajuan pelaksanaan di lapangan. Seluruh pemerintah daerah baik pemkot, pemkab dan pemprov terus mengembangkan usahanya sejak pemekaran pada era reformasi sehingga muncul pemekaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Bagi daerah pemekaran yang masih baru seperti Tanah Tidung dan Mahakam Hulu sedang masa transisi tetapi mulai menggeliat. Berikut keadaan sejak pemekaran yang ke 3 (tiga) di masa reformasi wilayah pemekaran berdampak positif dan negatif.

1. Dampak positif

- 1.1. Pemerintah Kabupaten Paser Utara
- 1.2. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
- 1.3. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
- 1.4. Pemerintah Kabupaten Malinau
- 1.5. Pemerintah Kabupaten Nunukan

Tanggapan Terhadap Pemekaran

1. Tanggapan Positif

Pembentukan provinsi baru di Kalimantan Timur yakni Kalimantan Tenggara menginjak babak baru. Ternyata draft usulan pembentukan daerah otonom yang meliputi Kabupaten Paser Utara (PPU) , Kabupaten Paser (Kaltim) dan dua daerah lainnya di Kalimantan Selatan yakni Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Tanah Bumbu, sudah masuk ke Direktorat penataan daerah, otonomi khusus dan DPOD, Ditjen Otonomi daerah, Kementerian Dalam Negeri pada 17 Desember 2013.

“Penyerahan draf upaya peningkatan status empat kabupaten jadi provinsi Kalimantan Tenggara ini diterima Kasubdit Penataan Daerah Wilayah I Haryanto. Perinsipnya, pembentukan

provinsi baru di Kalimantan tidak menjadi masalah apabila seluruh stakeholder memberikan persetujuan,” Harimuddin Rasyid, kemarin (Kaltimpost ,Senin ,20 Januari 2014).

Harimuddin yang ikut menyusun pemekaran Panajam Paser Utara pada 2002 dan memakai yayasan yang didirikannya itu untuk kembali berusaha mewujudkan Kalimantan Tenggara. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebelum mengajukan draft ke Kemendagri, pihaknya sudah melakukan serangkaian pertemuan dengan kepala daerah pada empat kabupaten, khusus membahas rancangan provinsi ini.

“Para Bupati memberi respon positif upaya terwujudnya Kalimantan Tenggara. Alasannya, pemekaran untuk mendekatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat terpenting lainnya adalah mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat,” (Heryanto,Kaltimpost ,Senin ,20 Januari 2014)”.

Kasubdit penataan daerah wilayah I, Kemendagri, Heryanto menegaskan, tujuan pemekaran wilayah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setelah mempertimbangkan sebagai komponen. Ia menjelaskan, pemekaran sebuah wilayah harus memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai peraturan pemerintah (PP) nomor 78 Tahun 2007. Misalnya harus ada surat keputusan surat DPRD, persetujuan nama calon ibu kota Daerah Otonomi Baru , persetujuan pemberian hibah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan DOB minimal dua tahun berturut –turut sejak diresmikan, dan sejumlah item persyaratan teknis dan nonteknis lain.

Harimuddin menambahkan memang masih diperlukan serangkaian pekerjaan penelitian pada empat kabupaten mencakup kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial ,politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lainnya.

“Semua potensi tersebut dapat diketahui bila profil kabupaten telah didapat dan dianalisis dengan akurat. Analisis tentang potensi wilayah ini nantinya yang menjadi dasar menentukan dalam menggali sumber pendapatan asli daerah,” (Harimuddin ,Kaltimpost ,Senin ,20 Januari 2014)”.

Terkait tuduhan minor yang dialamatkan pada dirinya, bahwa usulan pemekaran Kalimantan Tenggara bermuatan politik seperti sewaktu getol memperjuangkan Pemerintah Kabupaten Baru yaitu Kabupaten Paser Utara (PPU) untuk mendongkrak dirinya untuk menduduki suatu jabatan namun tak terbukti karena setelah PPU terwujud Harimuddin tidak ambisius menduduki jabatan apapun di pemerintahan daerah sehingga tidak perlu khawatir pemekaran wilayah ini mengandung kepentingan pribadi. Sementara itu Kabag Humas Setkab Paser Adi Maulana, Minggu (12/1/2014 , pihaknya mendukung gagasan pembentukan provininsi Kalimantan Tenggara. Dia berargumentasi, pemekaran provinsi yang

sejak lama diwacanakan itu sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Paser dengan memekarkan Kabupaten Baru di wilayahnya yakni Kabupaten Paser Tengah.

“Saya kira bagus saja itu. Paser sendiri saat ini sedang berusaha memekarkan kabupaten sehingga program pemekaran provinsi dimaksud bisa sinergi, sama-sama untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat.” (Adi Maulana ,Kaltimpost Minggu 12/1/2014)

Dikatakan, bila terwujud provinsi Kalimantan Tenggara justru menyatukan empat kabupaten yaitu Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Tanah Bumbu, yang bila ditilik dari sejarahnya adalah semula dalam naungan satu daerah. Menurut sejarah Penajam Paser Utara adalah bagian dari Paser, dan Paser bagian dari Kalimantan Selatan. bila menjadi Kalimantan Tenggara sama artinya menyatukan kembali keempat daerah menjadi satu lagi.

2. Tanggapan Negatif

Nada penolakan datang dari Gubernur Kalimantan Timur yang menganggap usulan tersebut emosional belaka sebab sementara ini pemekaran untuk DOB masih moratorium di samping sulit memenuhi syarat menjadi provinsi baru. Alasan Gubernur Kalimantan Timur itu sangat kuat karena penyangga ekonomi, SDM dan infrastruktur amat tidak memadai. Lain lagi penolakan dari Balikpapan yang digadang oleh pemrakarsa Provinsi Kalimantan Tenggara sebagai ibukotanya. Andi Burhanuddin Solong (ABS) menganggap angin lalu jika Balikpapan dikaitkan dengan Kalimantan Tenggara. Ia bersikeras masih menjadi bagian dari Kalimantan Timur dan tidak ada niat untuk melepaskan diri. Balikpapan tetap eksis di Kalimantan Timur. Bahkan sampai saat ini belum ada pihak atau orang yang datang melobi atau membicarakan masalah Kalimantan Tenggara dengan pihaknya. Lain pula Walikota Balikpapan, Rezal Effendi , yang hanya mempertimbangkan fakta ekonomi. Ia mengatakan bahwa :

- a. Wilayah Selatan (Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser) akan terkena dampak dari pemekaran wilayah di Provinsi Kalimantan Tenggara bila pisah dengan Kalimantan Timur yaitu bakal merana atau melarat jika ngotot ingin membentuk provinsi baru.
- b. Keuangan wilayah selatan (Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser) bergantung dengan dana bagi hasil dari Kalimantan Timur
- c. Sementara selatan (Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser) merugi tetapi di wilayah tengah justru subur.

Ada juga pendapat pihak Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Balitbangda), M.Nasir, Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

bahwa ia mengaku belum mendengar namun kondisi sekarang yang baru terdiri dari Balikpapan Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser.

“Dalam peraturan pemerintah ada syarat obyektif, administratif, subyektif, dan pendukung sebagai DOB. Segi keuangan juga harus dipertmbangkan masak-masak apakah ia bisa menghidupi dan diri sendiri tanpa bantuan dari Kalimantan Timur? Sebenarnya yang kaya minyak dan SDA hanya wilayah tengah yaitu Kutai Kartanegara sedang Balikpapan dan Bontang hanya memproses saja. Dengan kata lain bila selatan (Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser) berpisah maka Kutai Kartanegara makin kaya karena tidak membagi hasil migasnya ke sana. ”Nasir (2014)

3. Tanggapan yang moderat

Bahwa pembentukan Provinsi Kalimantan Tenggara dapat terwujud dan amat sangat terwujud apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terjadi hal-hal berikut :

- a. Apabila Selatan (Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser) terabaikan oleh provinsi pada kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur wilayah termasuk lambat membangun jembatan penghubung antara Penajam Paser Utara dan Balikpapan di sisi manapun;
- b. Apabila Wilayah selatan dapat melaksanakan *Good Governance* terutama hilangnya tipikor;
- c. Apabila Pembentukan sumber ekonomi baru seperti perkebunan, migas dan mineral lain, pertanian dalam arti luas secara modern ;
- d. Apabila ada investor yang menanamkan modalnya untuk membangun jembatan Wilayah selatan yang menghubungkan antara Penajam Paser Utara dan Balikpapan di sisi manapun;
- e. Apabila Pemerintahan Wilayah Selatan kompak berkolaborasi dan sinergi mencari sumber keuangan asli yang baru;
- f. Apabila para pejabat ikhlas menerima gaji yang terbatas, perjalanan dinas diperketat, perilaku konsumtif dihilangkan.

Sekilas keadaan DOB Provinsi Kalimantan Utara

Sebelum dimekarkan menjadi Provinsi Kalimantan Utara juga kurang direspon karena masih terbatas segalanya namun setelah dapat membuktikan keberhasilan pemekaran sebelumnya di wilayah utara seperti Pemerintah Kota Tarakan, Pemerintah Kabupaten Malinau, Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Pemerintah Kabupaten Malinau maka membuka mata untuk mempercepat pembentukan Provinsi

Kalimantan Utara sebagai Daerah Otonom Baru. Berikut keadaan perkembangan provinsi ini versi Surat Kabar Tribun (Rabu, 7 Januari 2015) :

1. Data ke satu

Jika ditahun 2014 lalu Provinsi Kalimantan Utara belum bisa melaksanakan pembangunan fisik ,kini di tahun 2015 tentu menjadi kabar gembira bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Utara di tahun ini Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan undang –undang telah dimemperbolehkan melakukan pembangunan kantor pemerintahan. Pejabat Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Irianto Lamberie menyatakan selain melanjutkan program pembangunan sarana dan prasarana pemerintah yang telah dimulai konsentrasikan pembangunan sarana dan prasaranan jalan di beberapa daerah seperti pembangunan jalan pendekat dari Tanjung selor menunjuk lokasi pembanguan kawasan industri pelabuhan internasional (KIPI) Tanah Kuning di Kecamatan Tanjung Palas Timur (Bulungan). Kata Irianto, pembangunan jalan ini merupakan tindak lanjut pembangunan jalan yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan yang telah selesai masa kontrak .”Kemarin sudah dibangun separuh oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan nanti dilanjutkan pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan itu multyears dan sudah selesai maka akan disambung dengan APBD Provinsi Kalimantan Utara “ Sebut Irianto saat diwawancarai usai mengadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di masjid Nurul Muchlisin,Tanjung Selor,minggu (4/1) malam.Sarana jalan lain yang akan dipioritaskan pembangunannya ungkap Irianto adalah pembanguan jalan pendekat dari Tanjung Selor menuju jembatan Bulungan – Tarakan yang rencananya akan terbanggun sepanjang 75 kilometer.Selain pembangunan jalan infrastruktur pelayanan seperti rumah sakit dan sekolah juga akan dipioritaskan di tahun ini pembanguan infrastruktur pelayanan ini lanjutnya dapat pula diberikan ke daerah dalam bentuk dana cash ataupun dalam bentuk program. Dalam APBD Provinsi Kalimantan Utara juga telah disiapkan dana dampingan bagi sejumlah rencana pembaguan bandara Tanjung Harapan, bandara Juwata, pengembangan sejumlah dermaga dan pelabuhan di Nunukan serta tempat pembuangan sampah di Bulungan “ Kata Irianto, keseluruhan rencana pembanguan ini akan menyedot APBD Provinsi Kalimantan Utara lebih kurang Rp.1 T ,”Jadi anggaran fisik itu belanja pengadaan barang dan jasa lebih dari RP.1 T dari RP.1,9 T anggaran APBD. Program-program itu terutama di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, termasuk di SKPD lain seperti Dinas Pertanian termasuk juga ada belanja barang dan jasa yang mengarah pada pengembangan ekonomi kerakyatan seperti bantuan sapi, bibit, dan *hand traktor*,” rincinya. Ia mengakui, rencana pembanguan ini sepenuhnya belum sempat dibahas bersama DPRD Provinsi Kalimantan Utara pasalnya, pembahasan APBD Provinsi Kalimantan Utara 2015 masih melalui persetujuan, penetapan,dan evaluasi oleh menteri dalam negeri (mendagiri). “ Tetapi nanti akan ada

anggaran perubahan di anggaran perubahan itulah DPRD menggunakan fungsi penganggarannya. DPRD juga masih melakukan konsolidasi untuk alat kelengkapan dewan. Jadi sekarang masih kewenangan mendagri untuk menyetujui, menetapkan, dan mengevaluasi,” tandasnya (Tribun Kaltim)

2. Data ke Dua

Inggong Ala anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara mengakui, subsidi ongkos angkut penerbangan rute Tanjung Selor-Long Apung atau sebaliknya, di 2015 ini belum ada kejelasan sejak berakhirnya subsidi pada 27 Desember 2014. Untuk itu kata dia, dalam waktu dekat pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk membicarakan subsidi ongkos penerbangan agar tetap dinikmati masyarakat di awal tahun 2015 ini karena bulan Desember tanggal 27 itu sudah habis subsidiya sementara masyarakat dan mahasiswa yang libur ke kampung maupun yang turun ke kota ini sudah tertahan semua harga tiket sampai Rp.1,4 juta sehingga sudah tidak sesuai sama sekali.” Jelas Inggong di DPRD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Senin (5/1). Koordinasi masalah ongkos angkut ini lanjutnya akan disampaikan langsung kepada Pj.GUBERNUR Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan instansi yang terkait dengan transportasi udara ini. Sebab, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur saat ini terangnya telah memulai lelang sejak tiga hari yang lalu. “Informasi dari teman tiga hari yang lalu sudah mulai proses lelang, kalau Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ini belum jelas khususnya subsidi penerbangan dari Tanjung Selor ke Long Apung. Barang kali ini belum ada komunikasi saja, nanti segera mungkin kita konsultasi dulu dengan gubernur atau dengan dinas yang menanganinya,” ulasnya. Ia juga mengungkapkan, untuk subsidi ongkos angkut penerbangan bagi masyarakat pedalaman/perbatasan tahun 2014 lalu dianggarkan di APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp. 3 M selain itu, subsidi ini juga sebagian ditangani dana pusat. “Kemarin itu dari Samarinda ke Long Apung ada dua sumber dananya yaitu dari APBD sebanyak Rp 3 M dan dari pusat juga ada. Kami berharap, dalam waktu dekat sudah ada desain agar subsidi ongkos angkut ini tidak putus di awal tahun.” Tandasanya. (Wil, Tribun Kaltim)

3. Data ke Tiga

Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengakui, permasalahan subsidi ongkos angkut penerbangan bagi masyarakat perbatasan sejauh ini telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, menteri PPN/BAPPENAS, dan Kementerian Perhubungan. Irianto mengaku soal subsidi ini sempat menjadi bahan diskusi panjang dengan menteri dalam negeri era presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Gamawan Fauzi. Kata Irianto, Presiden Joko Widodo pada saat kunjungan ke Kalimantan Utara telah menerima beberapa usulan tentang subsidi ongkos angkut penerbangan bagi masyarakat perbatasan dan

pedalaman, salah satunya, meminta agar subsidi tersebut dinaikan. Selain itu pihaknya juga mengusulkan agar proses pelelangan subsidi tersebut dilakukan dengan cara-cara di luar cara lelang konvensional,” Kalau biasa untuk daerah perbatasan itu penanganannya bukan dengan cara normatif konvensional begitu. Kalau perlu multiyeras aja sekaligus jadi biasa 3 atau 5 tahun sekali.” ulasnya. Dengan cara Lelang yang demikian, diharapkan tidak terjadi stagnasi pada akhir tahun anggaran yang mengakibatkan putusnya subsidi pada awal tahun hingga bulan April.” Karena menunggu lelang dan penetapan pemenangnya yang lama, akhirnya subsidi terhentikan sampai bulan April. Hal itu sudah kita sampaikan ke BNPP juga ke KEMNHUB bahkan dengan presiden langsung. Mudah-mudahan beliau ingat dan merespon itu dengan cepat,” tandasnya (Wil.Tribun).

Dari berita di atas bahwa Provinsi Kalimantan Utara sebagai Provinsi Baru bakal menggeliat membangun sarana prasarana untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Data ini menunjukkan untuk kesekian kalinya bukti keberhasilan DOB di Kalimantan Timur.

PENUTUP

Dari hasil penelitian tersebut di atas maka peneliti menarik simpulan dan saran-saran sebagai berikut :

1.

Kesimpulan

1. Bahwa DOB di Kalimantan Timur sangat berhasil secara sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan sehingga menjadi acuan bagi calon DOB yang akan datang.
2. DOB telah mempertimbangkan administratif, subyektif, obyektif, keuangan, SDM, SDA dan manajemen.
3. Kunci sukses DOB adalah Good Governance harus dilaksanakan oleh para *stakeholder* baik negeri maupun swasta terutama bersih dari tindak pidana korupsi.
4. DOB memerlukan lobi ke pusat yang kuat, waktu lama, sikap kritis yang pro rakyat, sumber finansial yang banyak meyakinkan para pihak akan komitmen membangun dan tabah dalam menghadapi masalah.
5. Pembentukan Provinsi Kalimantan Tenggara akan terwujud bila jembatan penghubung antara Balikpapan dan Penajam Paser Utara berhasil dibangun karena sumberdaya alam seperti batubara, pertanian, dan jasa akan mudah dimobilisasi.

2.

Saran-saran

Peneliti menyarankan dalam memekarkan suatu daerah :

1. Perhitungan harus cermat di segi sosial, budaya ,keamanan dan pertahanan agar DOB Provinsi Kalimantan Tenggara tersebut dapat menciptakan yang kondusif.
2. Perhitungangan ekonomi harus diprioritaskan agar DOB Provinsi Kalimantan Tenggara dapat terus eksis.
3. Pelayanan publik bagi DOB Provinsi Kalimantan Tenggara harus lebih baik lebih cepat dan lebih komunikatif
4. DOB Provinsi Kalimantan Tenggara harus mengamudir kepentingan para pemangku kepentingan
5. Bukti keberhasilan Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara saat ini dapat menjadi pertimbangan utama dan terus dipromosikan.
6. Pemekaran dengan pembentukan Provinsi Kalimantan Tenggara hanya akan terwujud bila para pemangku kepentingan berjuang tiada henti dengan bukti data persyaratan pemekaran yang akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur , 2014,Kaltim dalam angka ,Samarinda
- Buku Kerja Kalimantan Timur , 2012 , Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Buku Kerja Pemerintah Kota Samarinda
- Buku Kerja Pemerintah Kota Balikpapan
- Buku Kerja Pemerintah Kota Tarakan
- Buku Kerja Pemerintah Kota Bontang
- Buku Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
- Buku Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
- Buku Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
- Buku Kerja Pemerintah Kabupaten Nunukan
- Buku Kerja Pemerintah Kabupaten Bulungan
- Buku Kerja Pemerintah Kabupaten Malinau
- Buku Kerja Pemerintah Kabupaten Berau
- Buku Kerja Pemerintah Kabupaten Tana Tidung
- Buku Kerja Pemerintah Kabupaten Mahakam Hulu
- Buku Kerja Pemerintah Kabupaten PPU
- Buku Kerja Pemerintah Kabupaten Paser
- Buku Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
- Kaltim Post , 214, Surat kabar Harian , Balikpapan
- Majalah Media Indonesia , 2014 , Jakarta ,
- Tribun Kaltim , 214, Surat kabar Harian , Balikpapan
- Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah